

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah :

1. Persiapan-persiapan yang telah dilakukan dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu, diadakannya sosialisasi dan bimtek, adanya sarana dan prasarana yang mendukung, dukungan aplikasi SIMDA keuangan, komitmen pemimpin, dan merevisi peraturan pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
2. Kota Pangkalpinang telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015. Penerapan ini telah sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 10 ayat (2) Permendagri 64 Tahun 2010. Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 sudah berjalan cukup baik, hanya saja Pemerintah Kota Pangkalpinang masih belum bisa merasakan manfaat yang diperoleh serta belum berimplikasi terhadap proses sosial yang ada, yang dirasakan saat ini adalah laporan keuangan yang semakin baik namun belum sempurna.

3. Kendala dalam Penerapan PP No.71 Tahun 2010 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang antara lain, masih banyaknya SDM yang berlatar belakang bukan akuntansi dan terjadinya defisit anggaran. Pemahaman SDM yang dimiliki Pemerintah Kota Pangkalpinang mengenai PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual saat ini masih secara umum belum secara keseluruhan.
4. Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Kelebihan diterapkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual pada Pemerintah Kota Pangkalpinang antara lain, membuat laporan keuangan pemerintah menjadi lebih transparan dan jelas, serta dapat meminimalisir kesalahan yang diperbuat dalam laporan keuangan, sehingga lebih menggambarkan laporan keuangan dan kondisi nyata manajemen pemerintah, juga memberikan kemudahan kepada pengguna terutama masyarakat tentang kondisi Kota Pangkalpinang.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Berikut adalah keterbatasan-keterbatasan yang dialami peneliti selama melakukan penelitian tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) pada Pemerintah Kota Pangkalpinang:

1. Peneliti tidak diizinkan untuk memperoleh revidi atas laporan keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang
2. Sulitnya untuk menemui narasumber karena kesibukan pekerjaan mereka, dan peneliti harus melakukan pengiriman surat izin penelitian kembali untuk melakukan wawancara kepada setiap bidang yang ada di BAKUEDA serta pegawai yang sulit untuk dijadikan narasumber bagi peneliti.

### **5.3 Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang, masih diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah Kota Pangkalpinang akan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Diharapkan dapat diadakan lebih sering sosialisasi dan pelatihan atau bimtek berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara total.
2. Untuk Penelitian mendatang, diharapkan dapat memperluas penelitian di Kota Pangkalpinang, dengan menambah lebih banyak jumlah narasumber untuk memperoleh data dan informasi yang lebih mendalam.